

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Setelah peneliti mencari berbagai literatur dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Ada beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan Pemberdayaan Kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia adalah sebagai berikut :

“Implementasi Strategi Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia (BP3TKI) Lampung Dalam Mengelola Tenaga kerja Indonesia Bermasalah Tahun 2006”. Disusun oleh Ayu Wulandari (1316041013) Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , Universitas Negeri Lampung Tahun 2017. Kesimpulan dari penelitian ini adalah membuat implementasi strategis. BP3TKI kota lampung dalam mengelola TKI kota lampung tahun 2006 dari kendala- kendala yang dihadapi BP3TKI kota lampung serta membuat strategi agar TKIB berjalan dengan baik , pembinaan serta pemberdayaan tenaga kerja Indonesia, perlunya peningkatan hukum dan perlindungan terhadap TKI¹⁰.

“Perlindungan Tenaga kerja Indonesia Di Luar Negeri Oleh BP3TKI Yogyakarta: kajian Perlindungan Pada Masa Pra Penempatan Tahun 2015”. Disusun Oleh Wisnu Kawirya (11340114), Ilmu Hukum, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta Tahun 2015. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bentuk perlindungan yang dilaksanakan oleh BP3TKI pada masa pra penempatan meliputi

¹⁰ Ayu Wulandari, *Implementasi Strategi balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Lampung Dalam Mengelola Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah*, (Bandar lampung : Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, 2017).

sosialisasi, pembekalan, dan verifikasi dokumen dan tenaga kerja luar negeri memberikan perlindungan serta pembekalan sebelum keberangkatan. Faktor internal yang mempengaruhi BP3TKI Yogyakarta dalam menjalankan tugas dan fungsi pra penempatan yaitu keterbatasan sarana dan prasarana dan keterbatasan anggaran dana dalam proses pelayanan kepada masyarakat baik calon TKI. Faktor eksternal yaitu lemahnya dukungan dari pemerintah setempat mengenai penempatan tenaga kerja luar negeri, lemahnya sumber daya manusia (TKI) dalam keterampilan serta lemahnya pengawasan.¹¹

“Kinerja BP3TKI Dalam Menangani TKI Ilegal Di Daerah Istimewa Yogyakarta” Disusun Oleh Octavia Nur Kasih Dan Sugi Rahayu, Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2016. Kesimpulan dalam Jurnal Penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis kinerja BP3TKI dalam menangani TKI di daerah istimewa Yogyakarta serta faktor pendukung dan penghambat, pengukuran kinerja BP3TKI sangat penting terkait permasalahan serta kendala-kendala yang dihadapi TKI karena akan memberikan gambaran nyata mengenai kinerja BP3TKI. Adapun faktor pendukung kinerja BP3TKI dalam program sosialisasi haruslah sesuai dengan SOP, adanya input rapat rutin dengan dinas tenaga kerja dan transmigrasi, sedangkan faktor penghambatnya yaitu pemangkasan anggaran sosialisasi pada tahun 2016 dan belum adanya SOP.¹²

“Pelaksanaan Tugas BP3TKI Kota Makassar Terhadap Pemberdayaan pekerja Migran Indonesia Purna penempatan” Disusun Oleh Fitriyanti

¹¹ Wisnu Kawira, *Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Oleh BP3TKI Yogyakarta :Kajian Perlindungan Pada Masa Pra Penempatan*, (Yogyakarta : Ilmu Hukum, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

¹² Octavia Nur Kasih dan Sugi rahayu, *Kinerja BP3TKI Dalam Menangani TKI Ilegal Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Universitas Negeri Yogyakarta. 2016

Arsyad Putri, Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar Tahun 2018. Kesimpulan penelitian ini mengenai tugas BP3TKI yaitu terdapat 3 tahapan penting pertama tahap pendataan, kedua tahap rehabilitasi dan ketiga tahap pemberdayaan dan juga kesimpulan dalam penelitian ini membahas mengenai faktor - faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas BP3TKI dalam menjalankan program yaitu faktor sarana dan fasilitas yang harus lebih diperhatikan¹³.

“*Praktek Pemberdayaan Tenaga kerja Indonesia Purna Di BP3TKI Kota Yogyakarta*” Disusun Oleh Assumpta H. Dr, Suharko, S.Sos.,M.Si.Universitas Gajah Mada, 2016. Hasil kesimpulan penelitian ini menggambarkan proses pemberdayaan TKI purna di Kabupaten Kulon Progo yang dilakukan oleh BP3TKI, pemberdayaan tersebut dilakukan pelatihan pengembangan usaha pasca pemberdayaan namun yang terjadi sering kali diadakan sehingga hasil penelitian yang diberikan kepada TKI kurang maksimal¹⁴

Melihat dari beberapa penelitian-penelitian terdahulu belum ada yang mengkaji mengenai Peran BP2MI Kota Palembang Dalam Pemberdayaan Kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dari mulai pra penempatan hingga purna penempatan pekerja migran Indonesia serta penelitian ini juga mengkaji apa saja permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia dan solusi yang diberikan BP2MI dan dalam hal ini penelitian ini dilaksanakan di kota palembang Oleh karena itu, penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Maka peneliti membuat

¹³ Fitriyanti Arsyid Putri, *Pelaksanaan Tugas BP3TKI Kota Makassar Terhadap Pemberdayaan pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan*, (Makassar : Ilmu Hukum, fakultas Hukum, Universitas Hasanudin, makasar, 2018)

¹⁴ Assumpta Suharko, *Praktek Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia Purna Di BP3TKI Kota Yogyakarta*, Universitas Gadjah Mada, 2016

tinjauan pustaka dalam bentuk tabel dibawah ini agar terlihat antara persamaan maupun perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Tabel. 2

Tinjauan Pustaka Dari penelitian Terdahulu

No	Nama Dan Tahun Penelitian	Judul penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
1	Ayu Wulandari,2017	Implementasi Strategi Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia (BP3TKI) Dalam Mengelola Tenaga kerja Indonesia Bermasalah Tahun 2006	Membuat implementasi strategis. BP3TKI kota lampung dalam mengelola TKIB kota lampung tahun 2006 dari kendala-kendala yang dihadapi BP3TKI kota lampung serta membuat strategi agar TKIB berjalan dengan baik , pembinaan serta pemberdayaan tenaga kerja Indonesia, perlunya peningkatan	Perbedaan dari penelitian ini adalah tempat dan waktu penelitian dan variabel penelitian.	Persamaan Penelitian ini adalah mengenai kendala-kendala yang dihadapi

			hukum dan perlindungan terhadap TKI		
2	Wisnu Karwiya,2015	Perlindungan Tenaga kerja Indonesia Di Luar Negeri Oleh BP3TKI Yogyakarta: kajian Perlindungan Pada Masa Pra Penempatan Tahun 2015	Untuk mengetahui bentuk perlindungan yang dilaksanakan oleh BP3TKI pada masa pra penempatan yang meliputi sosialisasi, pembekalan,dan verifikasi dokumen dan tenaga kerja luar negeri memberikan perlindungan serta pembekalan sebelum keberangkatan	Perbedaan dari penelitian ini adalah tempat dan waktu pelaksanaan penelitian.	Persamaan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan yang dilaksanakan BP3TKI
3	Octavia Nur Kasih Dan Sugi Rahayu,2016	Kinerja BP3TKI Dalam Menangani TKI Ilegal Di Daerah Istimewa Yogyakarta	Mendeskripsikan dan menganalisis kinerja BP3TKI dalam menangani TKI di daerah istimewa	Perbedaan dari Penelitian ini adalah tempat dan waktu penelitian dan juga variabel	Dalam penelitian ini tidak terdapat persamaan

			Yogyakarta serta faktor pendukung dan penghambat, pengukuran kinerja BP3TKI.	penelitian.	
4	Fitriyanti Arsyid Putri,2018	Pelaksanaan Tugas BP3TKI Kota Makassar Terhadap Pemberdayaan pekerja Migran Indonesia Purna penempatan	Terdapat 3 tahapan penting pertama tahap pendataan, kedua tahap rehabilitasi dan ketiga tahap pemberdayaan dan juga kesimpulan dalam penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas BP3TKI dalam menjalankan program yaitu faktor sarana dan fasilitas yang harus lebih	Perbedaan dari penelitian ini adalah tempat dan waktu penelitian serta variabel penelitian	Persamaan dari penelitian ini adalah sama sama mengkaji mengenai tugas BP3TKI dalam pemberdayaan PMI

			diperhatikan		
5	Assumpta Suharko,2016	Praktek Pemberdayaan Tenaga kerja Indonesia Purna Di BP3TKI Kota Yogyakarta	Pemberdayaan yang dilakukan merupakan pelatihan pengembangan usaha namun yang terjadi sering kali ditiadakan sehingga hasil penelitian yang diberikan kepada TKI kurang maksimal	Perbedaan penelitian ini adalah tempat dan waktu penelitian serta variabel penelitian.	Dalam Penelitian ini tidak dapat persamaan

B. Kerangka Teori

Kerangka Teoritis merupakan bagian yang menjelaskan detail tentang teori-teori yang akan digunakan dalam membahas masalah penelitian¹⁵.

1. Teori Peran

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya menjalankan perannya.¹⁶ Teori peran berbicara tentang istilah “Peran” yang biasa digunakan sebagai tokoh tertentu dalam posisinya tokoh tersebut diharapkan dapat berperilaku sesuai perannya¹⁷.

Peran menurut Riyadi dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep yang dimainkan dalam suatu pihak dalam oposisi sosial, dengan peran tersebut pelaku baik itu individu ataupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang maupun lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan dan tanggung jawab) dimana didalamnya terdapat tekanan dan kemudahan yang saling berhubungan yang menjalankan berbagai peran.¹⁸

¹⁵ Pedoman Penulisan Skripsi, (Palembang: fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2016), hlm.25

¹⁶ Soerjono Soekanto, Sosiologi Sebagai Pengantar, (Jakarta: PT. raja Grafindo Persada, 2001), hlm.267

¹⁷ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm.215

¹⁸ Riyadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan otonomi Daerah*, (Jakarta: Gramedia, 2002), hlm.138

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹⁹

Menurut Sudikno Soeharto dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum memiliki tujuan hukum memiliki sasaran yang hendak dicapai adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuan itu hukum bertugas membagi hak dan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta kapasitas hukum²⁰.

Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan pekerja migran Indonesia terdapat pada UU No.18 Tahun 2017 dan Perka No 04 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan PMI Purna dan Keluarganya. Pengaturan penempatan dan perlindungan PMI ke luar negeri diatur dengan undang-undang karena :

1. Bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya.
2. Hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak baik di dalam maupun diluar negeri

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 19984), hlm. 133

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, 1999, hlm. 71

sesuai dengan keahlian , keterampilan , bakat dan minat dan kemampuan.

3. Dalam kenyataannya PMI yang bekerja ke luar negeri sering menjadi objek perdagangan manusia, kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-kewangan kejahatan atas harkat dan martabat manusia serta perlakuan lain yang berkaitan dengan hak asasi manusia.
4. Negara wajib menjamin keamanan warga negaranya baik yang bekerja di dalam maupun diluar negeri sesuai dengan prinsip persamaan hak,demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan gender dan anti diskriminasi.
5. Penempatan PMI perlu dilakukan secara terpadu antara instansi pemerintah baik pusat maupun daerah dan juga peran serta dari masyarakat dalam suatu produk hukum sehingga memberikan perlindungan yang maksimal.²¹

3. Teori Actors Dalam Pemberdayaan

Pemberdayaan (empowerment) secara etimologis berasal dari kata daya yang berarti kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak, kemudian menjadi “berdaya” yang berarti berkekuatan, berkemampuan, bertenaga, mempunyai akal untuk mengatasi suatu masalah.²²

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap

²¹ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*,(Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2007),hlm.88

²² Alfin Arifin,et. Al.,*Pengaruh Pemberdayaan dan Motivasi Terhadap Kinerja karyawan,Jurnal Administrasi Bisnis* , (Malang ,vol 8,No.2,2014),hlm.3

kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan merupakan upaya membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata²³.

Pemberdayaan berarti menyediakan sumber daya, kesempatan dan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka meningkatkan kemampuan warga miskin untuk menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakatnya. Strategi pemberdayaan yang lengkap menuntut bahwa hambatan-hambatan yang dihadapi oleh masyarakat dalam menggunakan kekuatannya dihadapi, diperhatikan dan dipecahkan²⁴.

Pemberdayaan masyarakat lazim dikonsepsikan sebagai usaha melakukan perubahan kondisi sosial masyarakat dan ekonomi dengan dilandasi oleh perencanaan atau plan kearah yang lebih baik, dalam rangka meningkatkan aset dan kapabilitas kelompok miskin.²⁵

Pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan mengoptimalkan keberdayaan dengan upaya pemberian kesempatan dan memfasilitasi agar mereka memiliki aksesibilitas terhadap sumber daya yang berupa modal, teknologi, informasi, jasmani dan kelompok lemah dalam masyarakat.²⁶

²³ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat wacana & praktik*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 24

²⁴ *Ibid.*, hlm. 43

²⁵ Suyanto Usman, *Esai-Esai Sosiologi Perubahan Sosial*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 44

²⁶ Totok Mardikanto, H. Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung : Alfabeta, 2015), hlm. 61

Maka dari itu peneliti menggunakan Teori Actors dalam pemberdayaan pekerja migran, *Teori Actors* yaitu *Authority* (kewenangan), *Confident and Competent* (rasa percaya diri dan kemampuan), *Trust* (keyakinan), *Opportunities* (kesempatan), *Responsibility* (tanggung jawab), *Support* (dukungan).

Teori ini dikemukakan oleh Sarah Cook dan Steve Macaulay yang lebih memandang masyarakat sebagai subjek yang dapat melakukan perubahan dengan cara membebaskan seseorang yang secara kaku dan memberi seseorang tersebut kebebasan bertanggung jawab terhadap ide-ide dan keputusan-keputusan serta tindakan-tindakannya.²⁷

Pemberdayaan yang dimaksudkan oleh Cook dan Macaulay lebih mengarah pada pendelegasian social, etika dan moral antara lain mendelegasikan wewenang social, mengatur kinerja, mengembangkan organisasi, menawarkan kerjasama, berkomunikasi secara efisien dan mendorong adanya inovasi serta menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi.

Pemberdayaan Pekerja migran Indonesia yang dimaksudkan oleh peneliti sebagai pemberdayaan yang bertujuan memiliki tahapan perbaikan mutu hidup dari pekerja migran tersebut baik secara fisik, mental, ekonomi, sosial dan budaya dan juga diharapkan sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan (*skill*) agar dapat berusaha mandiri atau menjadi pekerja migran yang berkualitas dan lebih produktif memanfaatkan penghasilan yang didapatkan dari bekerja sebagai pekerja migran dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupannya.

²⁷ Sarah Cook & Steve Macaulay, *Perfect Empowerment*, (Jakarta : PT.Elex Media Komputindo, 1997)

4. Teori Kesejahteraan

Kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan Pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama masyarakat lainnya. Menurut HAM, kesejahteraan adalah bahwa setiap laki-laki atau perempuan, pemuda dan anak-anak memiliki hak untuk hidup yang layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa social, jika tidak maka hal tersebut melanggar hukum.²⁸

Adapun kesejahteraan menurut UU tentang kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan sosial materil maupun spiritual yaitu meliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yakni memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya baik bagi diri sendiri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia yang sesuai.²⁹

Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi, dimana kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat, maka setiap individu membutuhkan kondisi yang sejahtera, baik

²⁸ Ikhwani Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Perss, 2006), hlm. 24

²⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1

sejahtera dalam hal materi dan dalam non material sehingga diharapkan terciptanya masyarakat yang sejahtera.

Maka dari itu peneliti juga menggunakan Teori Kesejahteraan menurut Nasikun merupakan konsep kesejahteraan dapat dirumuskan sebagai pandangan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu rasa aman (*security*), kesejahteraan (*welfare*), kebebasan (*freedom*), dan jati diri (*identity*).

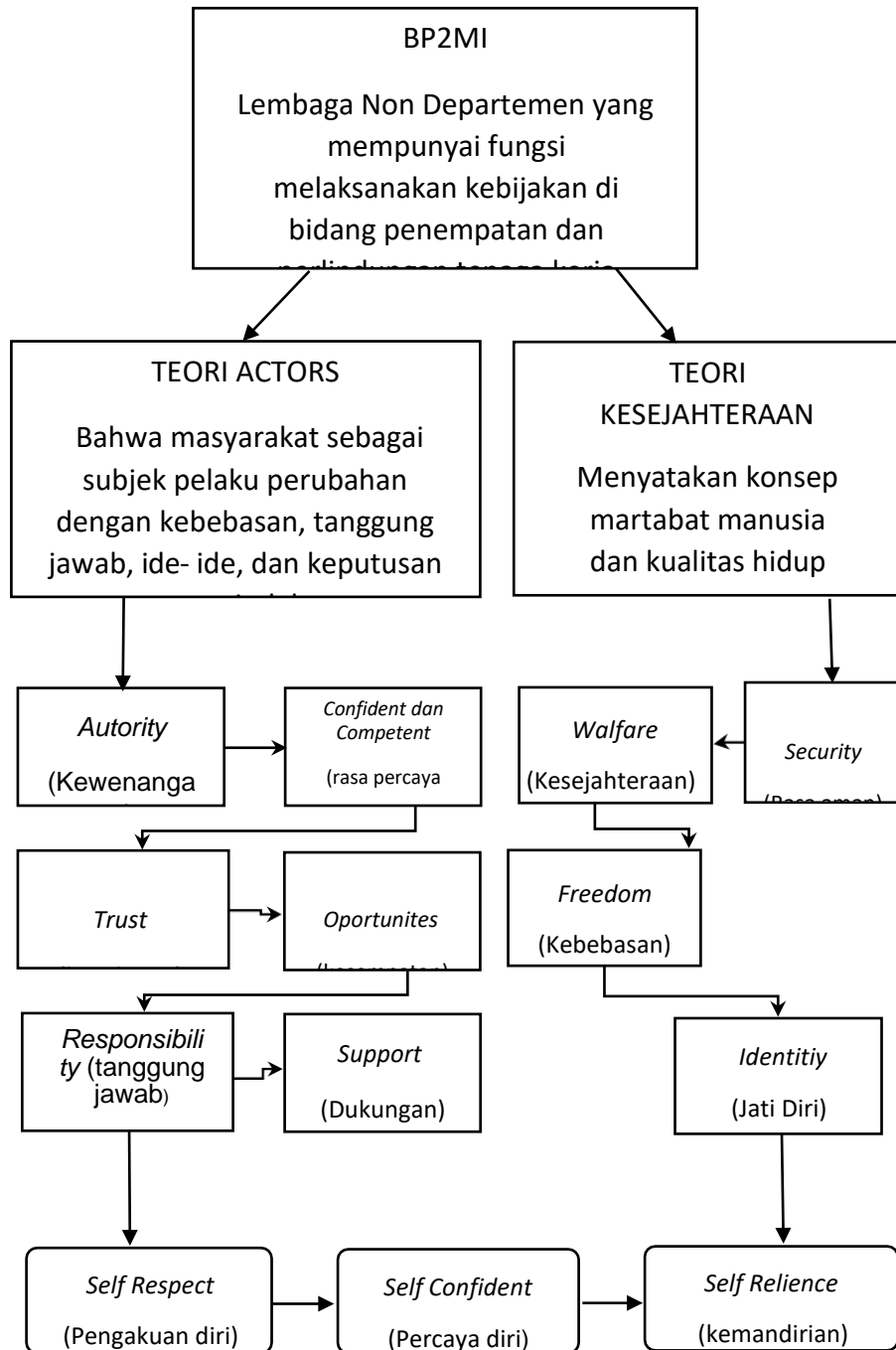
Permasalahan Pekerja Migran Indonesia, bila meninjau konsep Nasikun bahwa belum terpenuhinya hak atas kebutuhan secara layak karena belum memperoleh kesejahteraan, kebutuhan yang layak, kebebasan dan pemertabatan manusia, akibatnya masih ada warga negara pekerja migran indonesia atau tenaga kerja Indonesia mengalami hambatan dan kendala pelaksanaan sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak , dengan kata lain pekerja masih mendapati realita semu tentang kesejahteraan menjadi pekerja migran.

Dalam hal ini tingkat kesejahteraan (*welfare*) adalah konsep yang digunakan untuk menyatakan kualitas hidup suatu masyarakat dan individu dalam kurun waktu tertentu. Kesejahteraan itu bersifat luas yang dapat diterapkan dalam skala social besar dan kecil misalnya keluarga dan individu, kesejahteraan atau rasa sejahtera yang dimiliki individu bersifat relatif, tergantung bagaimana penilaian masing-masing individu terhadap kesejahteraan itu sendiri, sejahtera bagi pendapatan individu tertentu belum tentu sejahtera bagi individu lainnya

Untuk lebih jelasnya dari kedua teori yang peneliti gunakan dapat dilihat pada bagan teori di bawah ini :

Bagan Teori. 1

Teori Actors Dan Teori Kesejahteraan



D

Dengan menggunakan teori Actors dan teori kesejahteraan pada bagan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Teori actors mempunyai 6 indikator yang merupakan

1. Authority (kewenangan)

Kelompok atau masyarakat diberikan kewenangan untuk merubah pendirian kewenangan untuk merubah pendirian atau semangat etos kerja menjadi sesuatu yang menjadi milik mereka sendiri sehingga dengan demikian mereka dapat merasakan perubahan yang dilakukan dari yang mereka harapkan yang menuju perubahan yang lebih baik dalam hal ini pekerja migran.

2. Confidence and competence

Menimbulkan rasa percaya diri dengan melihat kemampuan para pekerja migran Indonesia untuk dapat merubah keadaan

3. Trust

Seorang aktor harus menumbuhkan dan menumbuhkan keyakinan serta kepercayaan bahwa mereka dalam hal ini PMI mempunyai potensi untuk merubah keadaan menjadi lebih baik

4. Opportunities

Memberikan kesempatan kepada cpmi atau pmi untuk memilih apa yang menjadi keinginan mereka sehingga mereka dapat mengembangkan sesuai dengan potensi mereka.

5. Responsibilities

Dalam melakukan perubahan para cpmi atau pmi tentunya harus dengan perencanaan sehingga haruslah dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

6. Support

Sangat perlu adanya support atau dukungan dari berbagai pihak dalam hal ini badan perlindungan pekerja migran Indonesia diharapkan dapat mendukung dan membantu para pekerja migran Indonesia untuk dapat mengatasi apa yang menjadi kendala mereka.

Teori Kesejahteraan menurut nasikun mempunyai 4 indikator yaitu dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Rasa Aman

Kenyamanan atau rasa aman merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling penting, setiap manusia dan masyarakat membutuhkan hak atas rasa aman untuk dirinya sendiri dalam hal ini meningkatkan keamanan adalah hal terpenting yang harus diperhatikan untuk menciptakan keadaan yang nyaman dalam aspek fisik, sosial maupun psikospiritual terutama untuk para pekerja migran Indonesia sehingga cpmi atau pmi dapat leluasa melakukan aktivitas mereka.

2. Kesejahteraan

Kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial masyarakat dan dapat hidup layak sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya.

3. Kebebasan

Manusia mempunyai hak untuk bebas selama kebebasan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang adalah tidak adanya larangan dan tidak adanya intervensi non diskriminasi, kebebasan menyampaikan aspirasi, kebebasan

bergerak sehingga dapat memberi perlindungan terhadap para pekerja migran Indonesia.

4. Jati Diri

Setiap manusia tentunya mempunyai jati diri yang berbeda sifat dan agama, dan budaya yang berbeda yang dapat terlihat dari kepribadian atau keadaan seseorang dalam kehidupannya dengan adanya perbedaan dalam jati diri setiap masyarakat maka diperlukan suatu penghargaan atau sikap saling menghargai baik tua maupun muda, bawahan maupun atasan.

Dengan teori tersebut diharapkan menciptakan para pekerja migran yang memiliki rasa percaya diri (self confident) mampu menjalankan fungsi sosial mereka mampu mengembangkan potensi dan kemampuan yang ada pada diri mereka dan mendapatkan pengakuan diri (self respect) atas apa yang mereka lakukan tanpa adanya diskriminasi dan saling menghargai sehingga para pekerja migran yang dapat menjadi pekerja yang mandiri (self reliance).